



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT PERTANIAN BOGOR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDRIYANTO**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN II BIDANG SUMBERDAYA, KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN**
3. NHK : **854725**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.599.250.000**

1. Tanah Seluas 73 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 73.000.000
2. Tanah Seluas 151 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 113.250.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/100 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 195.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 238 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 914.000.000
5. Tanah Seluas 76 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 304.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **187.800.000**

1. MOBIL, HONDA BR-V 1.5 PRESTIGE CVT Tahun 2017, HIBAH TANPA AKTA Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 19.800.000
3. MOTOR, HONDA GENIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
4. MOTOR, HONDA ASTREA A C100 Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **175.000.000**

D. SURAT BERTAHAPAN Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **429.144.073**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.391.194.073

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.391.194.073

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.